



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI  
KE KABUPATEN MERAUKE,  
PROVINSI PAPUA SELATAN  
RESES MASA PERSIDANGAN III 2022-2023  
TANGGAL 17-21 FEBRUARI 2023**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**KOMISI V DPR-RI  
JAKARTA, 2023**

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
I.1. Dasar Hukum.....	3
I.2. Maksud dan Tujuan .....	3
I.3. Lokasi dan Waktu .....	4
I.4. Agenda Kunjungan .....	4
<b>II. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>4</b>
<b>III. HASIL KUNJUNGAN KERJA .....</b>	<b>6</b>
II.1. Hasil Pertemuan .....	6
II.2. Temuan atau Pendalaman .....	12
<b>IV. KESIMPULAN ATAU REKOMENDASI .....</b>	<b>13</b>
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>14</b>
<b>VI. LAMPIRAN .....</b>	<b>15</b>
Foto Kegiatan .....	15



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI  
KE KABUPATEN MERAUKE, PROVINSI PAPUA SELATAN  
RESES MASA PERSIDANGAN III 2022 - 2023  
TANGGAL 17-21 FEBRUARI 2023**

=====

## **I. PENDAHULUAN**

### **I.1. Dasar Hukum**

Dasar hukum dari Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut:

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23.
2. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4. Rapat Internal Komisi V DPR RI Tanggal 11 Januari 2023.

### **I.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Kunjungan Kerja adalah untuk mengetahui secara langsung serta menggali informasi terkait permasalahan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi di Kabupaten Merauke, khususnya yang berkaitan dengan program kerja Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDTT, BMKG, dan BNPP/Basarnas yang merupakan mitra kerja Komisi V DPR RI.

Sedangkan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (4), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu:

*butir a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN,*

*serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; butir d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.*

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:

*butir f. mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.*

### **I.3. Lokasi dan Waktu**

Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dilaksanakan pada Masa Persidangan III Tahun 2022-2023 dalam rangka meninjau Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Tanggal 17-21 Februari 2023 yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Bapak **ROBERTH ROUW (A-405 / F-P NASDEM / DAPIL PAPUA)**.

### **I.4. Agenda Kunjungan**

Agenda kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan yaitu;

1. Pertemuan dengan Mitra Kerja Komisi V DPR RI (Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDTT, BMKG, dan BNPP/Basarnas), dan *stakeholders* di bidang Transportasi Nasional seperti PT Pelindo, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Pelni, serta Bupati dan Wakil Bupati Merauke dalam rangka meninjau Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
2. Peninjauan lokasi Pelabuhan Yos Sudarso kabupaten Merauke.
3. Peninjauan Pelabuhan Kelapa Lima kabupaten Merauke.

## **II. GAMBARAN UMUM**

Kabupaten Merauke merupakan Ibu Kota dari Provinsi Papua Selatan. Provinsi Papua Selatan dimekarkan dari Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, yang ditandatangani Presiden Indonesia, Joko Widodo, tanggal 25 Juli 2022. Jumlah penduduk Kabupaten Merauke kurang lebih 230.932 jiwa (Jumlah penduduk tahun 2021). Sungai-sungai besar di Kabupaten Merauke yakni Sungai Bian, Digul, Maro, Yuliana, Lorents, dan Kumbe merupakan potensi sumber air tawar untuk pengairan dan dapat

digunakan sebagai prasarana angkutan antar Distrik, Kecamatan, dan Desa–Desa. Sumber air tawar dari rawa–rawa, air permukaan dan air tanah cukup tersedia untuk dimanfaatkan sebagai sumber air minum. Namun, beberapa tempat lain terdapat air tanah yang mengandung belerang panas.

Kabupaten Merauke memiliki dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Yos Sudarso yang digunakan sebagai pelabuhan penumpang Kapal Pelnis sekaligus sebagai pelabuhan bongkar buat. Kemudian Pelabuhan Kelapa Lima yang digunakan sebagai pelabuhan angkutan perintis dan angkutan minyak.

Pelabuhan Yos Sudarso terletak di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan utama yang ada di Kabupaten Merauke, pelabuhan ini memiliki dermaga sepanjang 158 meter dan gudang terbuka seluas 600 meter persegi. Pelabuhan juga dilengkapi dermaga kayu dengan panjang 58 meter dan lebar 4 meter, serta dermaga untuk kapal Pertamina dengan panjang 70 meter dan lebar 5 meter. Pelabuhan Kelapa Lima merupakan Pelabuhan milik Pemerintah Kabupaten Merauke. Pelabuhan Kelapa Lima dikhususnya untuk melayani rute-rute pendek yang dilalui Kapal Perintis atau Kapal ASDP Ferry dan Kapal Minyak.

Tentunya, Provinsi Papua Selatan sebagai Provinsi Baru membutuhkan pembangunan infrastruktur dan transportasi seperti beberapa ruas Jalan Nasional, Jembatan, Prasarana Sekolah, Pelabuhan, dan lain sebagainya.



*Gambar: Pelabuhan Yos Sudarso (kiri) dan Pelabuhan Kelapa Lima Merauke (kanan)*

### III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

#### II.1. Hasil Pertemuan

##### 1. Bupati Merauke

##### b. Bidang Kementerian PUPR

- Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Merauke
  - Pokok masalahnya adalah rendahnya akses infrastruktur bagi masyarakat dan penopang pembangunan daerah.
  - Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar.
  - Masih banyak kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi kurang baik, belum terkoneksi jaringan jalan antar kabupaten Merauke-Mappi, belum meratanya ketersediaan irigasi, belum meratanya akses sanitasi bagi masyarakat, belum meratanya akses air bersih/minum bagi masyarakat, belum meratanya drainase penopang pembangunan daerah, belum meratanya irigasi penopang pengembangan pertanian, masih dijumpai terjadinya genangan air lebih dari 2 kali dalam 1 tahun, masih diperlukannya ketaatan dalam pemanfaatan pola ruang daerah, dan masih dibutuhkan penataan wilayah dalam dokumen RTRW.
- Pembangunan Jembatan Bian yang melintasi Sungai Bian sangat diperlukan di Distrik disebalah Barat Sungai Bian yang memiliki jumlah penduduk sangat signifikan yaitu sekitar 137.651 jiwa, ini sangat bermanfaat untuk menunjang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.
- Peningkatan DIR (Daerah Irigasi Rawah) Suam 1 dan Suam II, Rehabilitasi DIR Tambat, Rehabilitasi DIR Soa Senayu, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Rehabilitasi DIR Wasur, Rehabilitasi DIR Bokem, Rehabilitasi DIR Kumbe, Pembangunan Long Storage distrik Jagebob, Pembangunan Long Storage distrik Waan, dan Rehabilitasi Embung di Distrik Jagebob.
- Peningkatan DIR Semangga Kab. Merauke, Peningkatan DIR Sermayam-Erom Kab. Merauke, Peningkatan DIR Tanah Miring Kab. Merauke, Peningkatan DIR Kurik Kab. Merauke, Peningkatan DIR Jagebob Kab. Merauke, Rehabilitasi Rumah Pompa dan Saluran Muka DIR Kurik, Rehabilitasi Embung Efata Distrik Kurik Kabupaten Merauke.

- Pembangunan Pengendali Banjir Kota Merauke, Pembangunan pengaman kawasan wisata Pantai Lampu Satu dan Pantai Buti Kab. Merauke, Pembangunan bangunan pengaman pantai Ndalir Kab. Merauke, Pembangunan bangunan pengaman Pantai Lampu Satu Kab. Merauke, dan Pembangunan bangunan pengaman Pantai Okaba Kab. Merauke.
- Pembangunan rumah bagi Masyarakat Miskin, Pulau Terluar, Daerah Terpencil, dan Daerah Tertinggal, Terdampak Program Pemerintah ditujukan untuk memberikan kelayakan tempat tinggal yang sesuai dengan persyaratan kesehatan guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan bantuan rumah khusus, Rumah Susun dan Rumah Swadaya kepada masyarakat di Kabupaten Merauke dapat menjadi salah satu aspek dalam mengentaskan kemiskinan dan juga isu stunting di Kabupaten Merauke.

### c. Bidang Perhubungan

- Terkait usulan dibidang Perhubungan, Kabupaten Merauke memiliki Bandar Udara Mopah, Pelabuhan Umum Yos Sudarso, serta Pelabuhan Perintis Kelapa Lima. Adapun usulan dibidang Perhubungan sebagai berikut:
  - Pembangunan Garbarata Bandar Udara Mopah;
  - Penambahan/perluasan Terminal Penumpang Bandar Udara Mopah;
  - Rehabilitasi Landasan Pacu Bandar Udara Mopah;
  - Pengadaan *Crane* di Pelabuhan Umum Kabupaten Merauke;
  - Pengembangan Pelabuhan di Kabupaten Merauke;
  - Pembangunan Terminal Tipe B;
  - Pembangunan Bandar Udara Muting;
  - Pembangunan Jembatan Timbang;
  - Rehabilitasi Dermaga Beton Pelabuhan Kelapa Lima;
  - Peningkatan Sisi Darat Pelabuhan Kelapa Lima;
  - Rehabilitasi Gedung Kantor dan Gudang Pelabuhan Kelapa Lima;
  - Pembangunan Dermaga (Plengsengan) Pelabuhan Kelapa Lima;
  - Pembangunan Dermaga Kayu (BBM) di Matandi;
  - Pembangunan Sisi Darat Dermaga Kayu (BBM) di Matandi;
  - Pengadaan Forklift (7 ton);
  - Pengadaan Forklift (10 ton);

- Pembangunan Dermaga Kayu di Moi;
- Pembangunan Dermaga Kayu di Wanam Distrik Ilwayab;

## **2. Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR**

- Total panjang Jalan Nasional dibawah tanggung jawab BPJN Merauke yaitu 568,47 km, dan total panjang Jembatan adalah 3,097,4 m.
- Terdapat 15 Paket pekerjaan yang sudah terkontrak diantaranya; Preservasi Jalan Bupul-Erambu - Sota, Preservasi Jalan Bts. Kab. Boven Digoel/Merauke - Muting, Preservasi Jalan Getentiri - Bts. Kab. Merauke/Kab. Boven Digoel (MYC), Preservasi Jalan Tanah Merah – Getentiri (MYC), Preservasi Jalan Mindiptana - Tanah Merah (MYC), Peningkatan Struktur Jalan Akses PLBN Yetetkun I (MYC), Preservasi Jalan Waropko – Mindiptana, Pembangunan Jembatan Anak Nyum (MYC), Pembangunan Jembatan Kao (MYC), Pembangunan Jalan Iwur - Waropko II (MYC), PW 02 Pengawas Teknis Pembangunan Jalan Iwur - Waropko II (MYC), PW03 Pengawas Teknis Pembangunan Jembatan Anak Yum (MYC) - Jembatan Kao (MYC), PW 04 Pengawas Teknis Preservasi Jalan Mindiptana - Tanah Merah (MYC), PW 05 Pengawas Teknis Preservasi Jalan Tanah Merah-Getentiri (MYC), PW 06 Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Getentiri - Bts. Kab. Merauke/Kab. Bouven Digoel (MYC).
- Terdapat 3 Paket proses lelang yaitu Preservasi Jalan Sota – KM 40 – Merauke, Pembangunan Jembatan Bian (MYC), dan Pembangunan Jembatan Sawit.

## **3. Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR**

- Untuk progres Tahun Anggaran 2023
  - Rehabilitasi dan Prasarana Sekolah Provinsi Papua 1 (Lokasi Kabupaten Merauke), yaitu SD Inpres Bupul 2, SDN 2 Merauke, SDN Inpres Jaya Makmur, SD Inpres Muting 5, dan SMK Negeri 1 Merauke.
  - Rehabilitasi dan Prasarana Sekolah Provinsi Papua 1 (Lokasi Kabupaten Mappi), yaitu SDN Kaime, SD Inpres Baitate, Negeri Metim, SD Inpres Rayam, dan SD Inpres Isyaman.
  - Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yaitu Pembangunan Sanimas SPALD-S Provinsi Papua untuk Desa Rimba Jaya, Desa Samkai, Desa Maro, Desa Wasur, Desa Rimba Jaya, Desa Kelapa Lima, Desa Maro, Desa Karang Indah, Desa Bambu Pemali, Desa Bokem, Desa Seringgu Jaya, Desa Kurik, Desa Buti, Desa Kamundu, Desa Kamahedoga, Desa



Muli, Desa Harapan Makmur, Desa Wapeko, Desa Wonorejo, dan Desa Wariki.

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) yaitu Desa Kamahedoga Putra, Desa Kamahedoga Putri, Desa Kumundu Putra, Desa Kumundu Putri, Desa Yasa Mulya, Desa Sumber Harapan, Desa Yanggandur, Desa Muting, Desa Kuper, dan Desa Harapan Makmur.

#### **4. Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR**

- Luas wilayah kerja pada Kabupaten Merauke mencakup 46.554,31 km<sup>2</sup> atau 35,45% terhadap luas Wilayah Sungai kewenangan Balai Wilayah Sungai.
- Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2023:
  - Lanjutan Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Kota Merauke D.I.R Kurik Kab.Merauke pada Distrik Merauke, Kab. Merauke;
  - Lanjutan Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Lampu Satu Merauke di Distrik Merauke, Kab. Merauke; serta
  - Peningkatan D.I.R. Semangga Kab. Merauke, Distrik Semangga, Kab. Merauke.
- Usulan Kegiatan Prioritas:
  - Pembangunan Pengaman Pantai Lampu Satu Kab. Merauke;
  - Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Kota Merauke;
  - Peningkatan D.I.R. Tanah Miring Kab. Merauke;
  - Peningkatan D.I.R. Kurik Kab. Merauke;
  - Peningkatan D.I.R. Semangga Kab. Merauke;
  - Pembangunan D.I.R. Tanah Miring Kab. Merauke;
  - Peningkatan D.I.R. Semayam-Erom Kab. Merauke;
  - Peningkatan D.I.R. Jagebob Kab. Merauke;
  - Rehabilitasi Rumah Pompa dan Saluran Muka DIR Kurik Kab. Merauke;
  - Pembangunan Long Storage Distrik Sota Kabupaten Merauke;
  - Rehabilitasi Embung Efata di Kabupaten Merauke;
  - Pembangunan Sumur Air Tanah di Kab. Merauke.

## 5. Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR

- Tidak ada usulan dari pihak Balai Perumahan untuk Tahun 2023, akan tetapi Balai Perumahan Papua I mengikuti arahan dan usulan dari pihak Pemkab maupun Pemprov sesuai kebutuhan Daerah.
- Adapun realisasi Pembangunan Infrastruktur Perumahan dari Tahun 2019-2022, yaitu Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Susun di Kabupaten Merauke sebanyak 139 unit terdiri dari 5 tower, Pembangunan Rumah Khusus di Kab. Merauke sebanyak 50 unit, Bantuan Rumah Swadaya di Kab. Merauke sebanyak 57 unit terdiri dari 7 distrik, dan Bantuan PSU Rumah Umum dan Komersil di Kab. Merauke sebanyak 100 unit.

## 6. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR

- Kabupaten Merauke sebagai Ibu Kota Provinsi perlu mempersiapkan infrastruktur sesuai dengan standar Ibu Kota dengan dukungan infrastruktur PUPR serta infrastruktur Non PUPR yang terpadu dan berkelanjutan.
- Keterpaduan Pengembangan Kawasan Merauke dan Mappi sebagai lumbung pangan memerlukan dukungan infrastruktur PUPR berupa infrastruktur irigasi serta konektivitas sebagai *backbone* sistem logistik.
- Konektivitas Waropko (Boven Digoel) – Iwur (Pegunungan Bintang) dapat menurunkan biaya logistik material konstruksi di wilayah Merauke dan Mappi.
- Konektivitas darat Waemaeman (Mappi) – Mumugu (Asmat) dapat menjadi salah satu pengungkit percepatan kesejahteraan di kedua wilayah.
- Pembangunan Jembatan Kali Bian menjadi salah satu kunci untuk membuka aksesibilitas antara Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Mappi dan memperluas Kawasan Lumbung Pangan Merauke *Integrated Food and Energy Estate/ MIFEE*.
- BPIW memberikan rekomendasi terkait pengembangan infrastruktur PUPR, diantaranya:
  - Provinsi Papua Selatan terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Asmat perlu menyusun dokumen perencanaan DOB/Provinsi Baru;
  - Penyusunan *master plan* irigasi, *road map* hilirisasi produk padi, jagung, sawit, dan sagu sebagai komoditas pangan dan energi;

- Keterpaduan konektivitas multi moda (masih adanya sungai yang belum tersambung jembatan sebagai akses jalan);
- Percepatan konektivitas transportasi darat antara Kab Merauke dengan Kab Mappi (Merauke - Kali Bian - Kaliki - Nakias – Bade) yang masih belum terkoneksi karena beberapa titik kondisi jalan masih berupa tanah dan masih ada sungai yang belum tersambung jembatan.

## **7. Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan**

- Kegiatan Tahun Anggaran 2023 untuk Bandara Mopah, diantaranya:
  - Perbaikan dan Peningkatan Daya Dukung Runway termasuk marking;
  - Pengawasan Perbaikan dan Peningkatan Daya Dukung Runway termasuk Marking; serta
  - Perbaikan dan Peningkatan Daya Dukung Landas Parking termasuk Marking.
- Terkait tindak lanjut atas kejadian Pesawat JT 797 PK-LFO (hasil rekomendasi
- KNKT)
  - Terbitkan NOTAM ke pilot untuk *extra caution* ketika parkir di Parking Stand 5, untuk tidak *turning one wheel lock* ketika *taxi-out*.
  - Segera dibuat unit *Safety Management System* di UPBU Mopah
  - Sosialisasi dan penerapan terkait *Safety Management System* di UPBU Mopah.
  - AMC dalam management apron agar *dimanage* / atur agar pergerakan pesawat lebih efisien dan efektif.
  - Disarankan untuk pengadaan *Push Back Car* agar semua Parking Stand dapat terisi.
  - Untuk di Airnav belum semua personil sudah melaksanakan *training* terkait *Safety Management System*. Agar diprioritaskan untuk training *Safety Management System* bagi personil yang belum.

## **8. Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan**

- Masih terdapatnya bangkai KM. Patar yang mengganggu alur pelayaran Merauke;
- Terdapat kekurangan SDM di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Merauke terutama di bagian keuangan, ABK Kapal Patroli dan Pos Penjagaan;

- Masih terdapat beberapa fasilitas pelabuhan yang belum bisa memenuhi standar keamanan dan ketertiban di wilayah pelabuhan antara lain:
  - Akses masuk menuju daerah lingkungan kerja pelabuhan yang belum memiliki filter sehingga semua orang yang tidak berkepentingan pun bisa masuk.
  - Fasilitas pagar yang masih belum memiliki standar keamanan.
  - Area terminal penumpang dengan area kerja bongkar muat masih menjadi satu.
- Belum terdapatnya fasilitas kantor dan dermaga di wilayah kerja Wanam;
- Pembangunan fasilitas pelabuhan Wanam masih terkendala pembebasan lahan (penetapan lokasi);
- Terdapat fasilitas kantor di Pelabuhan Kumbe yang belum layak dan belum menjadi aset kantor karena tanah masih milik Pemda (Dishub);
- Belum terdapatnya kendaraan operasional roda empat untuk menunjang mobilitas pengawasan di wilayah kerja;
- Dengan telah terbentuknya Provinsi Papua Selatan serta melihat data *traffic* kapal dan barang yang semakin meningkat di Pelabuhan Merauke serta pendapatan PNBPN yang melebihi target.

#### **9. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan / Basarnas**

- Dibutuhkan kapal tipe kelas 1 yang dapat menjangkau luasan wilayah kerja;
- Belum tersedianya dermaga / tempat sandar kapal milik sendiri;
- Terbatasnya jumlah personil (petugas pencarian dan pertolongan) yang dimiliki saat ini.

#### **II.2. Temuan atau Pendalaman**

- 1) Diharapkan Jembatan Bian segera bisa diselesaikan agar masyarakat di Distrik Bagian Barat sungai Bain bisa menggunakannya sebagai akses utama.
- 2) Diharapkan fasilitas Air Bersih yang sudah dibangun untuk segera digunakan agar masyarakat bisa menikmati Air Bersih.
- 3) Harapan masyarakat di wilayah Pegunungan seperti Kabupaten Yahukimo adalah agar dilakukan pembangunan akses jalan dari Kabupaten Asmat ke wilayah Dekai, Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan.
- 4) Perlu dilakukan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana di Pelabuhan Umum Yos Sudarso dan Pelabuhan Kelapa Lima.

- 5) Perlu dipikirkan perencanaan jangka panjang atau master plan kedepan terkait penanganan banjir seperti merencanakan lokasi pembuatan bendungan atau embung karena sebagai Provinsi baru ini sangat dibutuhkan untuk masa yang akan datang.
- 6) Apa yang disampaikan oleh Bupati Merauke diharapkan masuk dalam *slot directed* atau prioritas DPR RI.
- 7) Perlu penambahan fasilitas *loading ramp* mobil di Pelabuhan, karena ini sangat berdampak pada perputaran ekonomi daerah kedepannya sebagai Provinsi Baru.
- 8) Perlu penambahan armada Kapal Perintis di Pelabuhan Kelapa Lima agar arus lalu lintas Kapal Perintis tidak terputus.
- 9) Perlu sinergitas pada masing-masing Direktorat Jenderal di Kementerian PUPR untuk membangun Provinsi Papua Selatan secara komprehensif.
- 10) Perlu menyusun dokumen perencanaan secara komprehensif sehingga arah pembangunan ke depan harus sesuai regulasi tata ruang dan harus melibatkan masyarakat adat untuk menghindari konflik.
- 11) Perlu penambahan armada kapal pada Pelabuhan Kelapa Lima.
- 12) Perlu penambahan fasilitas sarana dan prasarana di Pelabuhan Umum Yos Sudarso yang harus dilengkapi seperti fasilitas bongkar muat barang.
- 13) Perlu pemanfaatan sungai secara maksimal untuk kebutuhan air baku dan irigasi.

#### **IV. KESIMPULAN ATAU REKOMENDASI**

Kesimpulan atau rekomendasi yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Masa Persidangan III Tahun 2022-2023 Tanggal 17-21 Februari 2023, diantaranya:

1. Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk menindaklanjuti usulan dari Bupati Merauke, diantaranya:
  - a) Belum terkoneksi jalan antar Kabupaten Merauke – Kabupaten Mappi, Pembangunan Jembatan Bian, Peningkatan DIR (Daerah Irigasi Rawa), Pembangunan Pengendali Banjir Kota Merauke, dan Pembangunan rumah bagi masyarakat miskin.
  - b) Pengembangan sarana dan prasarana pada Pelabuhan Umum Yos Sudarso, Pelabuhan Kelapa Lima, serta Bandar Udara Mopah Merauke.

2. Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDTT, BMKG, dan BNPP/Basarnas untuk meningkatkan sinergitas dalam menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi Provinsi Papua Selatan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB).
3. Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk menambah armada Kapal Perintis di Pelabuhan Kelapa Lima.

## **V. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Masa Persidangan III Tahun 2022-2023 Tanggal 17-21 Februari 2023. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI dan akan disampaikan dalam Rapat Komisi bersama Mitra Kerja untuk ditindaklanjuti.

**KETUA TIM**

**ttd**

**ROBERTH ROUW**

**A-405**

## VI. LAMPIRAN

### Foto Kegiatan

















